



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LUTFI HALIDE
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 208146

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **10.735.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/150 m2 di KAB / KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
2. Tanah Seluas 8680 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, Rp. 175.000.000
3. Tanah Seluas 9894 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, Rp. 185.000.000
4. Tanah Seluas 40000 m2 di KAB / KOTA WAJO, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
5. Tanah Seluas 40000 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
6. Tanah Seluas 60000 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
7. Tanah Seluas 50000 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
8. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
9. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
10. Tanah Seluas 1600 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
11. Tanah Seluas 72 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
12. Tanah Seluas 50000 m2 di KAB / KOTA SOPPENG, Rp.



375.000.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

360.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 160.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 110.000.000
3. MOBIL, SUZUKI SWIFT MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp.

800.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp.

568.278.725

F. HARTA LAINNYA

Rp.

Sub Total

Rp.

12.463.278.725

III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

12.463.278.725

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.